

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
BAPPELITBANGDA KOTA TERNATE  
2025**



**PEMERINTAH KOTA TERNATE**  
**BAPPELITBANGDA TAHUN 2026**

# Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Tahun 2025

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian  
dan Pengembangan Daerah Kota Ternate

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA TERNATE  
TAHUN 2026

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kota Ternate Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Penyusunan LKIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan kepada BAPPELITBANGDA Kota Ternate dalam mengelola perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) BAPPELITBANGDA Kota Ternate Tahun 2025-2029.

Laporan Kinerja ini memuat pencapaian kinerja baik keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang pengukurannya menggunakan indikator kinerja sasaran strategis tahun 2025.

Semoga dengan tersusunnya dokumen LKIP BAPPELITBANGDA ini dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Ternate, serta dapat menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan ke depan yang lebih terarah, sistematis dan terkoordinasi.

**Ternate, 30 Februari 2025**

**Kepala BAPPELITBANGDA  
Kota Ternate**



**I. THAMRIN MARSAOLY, SP.M.Sc**  
NIP. 197807042005011012

## DAFTAR ISI

### Kata Pengantar

### Daftar Isi

<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	2
1.3. Tugas Pokok, Fungsi PD dan Struktur Organisasi .....	2
1.4. Permasalahan dan Isu Strategi Perangkat Daerah .....	5
1.5. Sistematika Penyajian.....	6
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>7</b>
2.1 Rencana Kinerja Menengah (Rencana Strategis) .....	7
2.2 Indikator Kinerja Utama.....	8
2.3 Perjanjian Kinerja Badan.....	9
2.4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan PD .....	10
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>16</b>
3.1. Capaian Kinerja Perangkat Daerah.....	16
3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	16
3.1.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah .....	17
3.1.3 Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah .....	18
3.1.4 Analisis Capaian Kinerja Perangkat Daerah .....	22
3.2. Realisasi Anggaran Perangkat Daerah .....	26
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>30</b>
4.1. Kesimpulan.....	30
4.2. Upaya Pemecahan Masalah.....	30

### LAMPIRAN

1. Penetapan Kinerja Tahun 2025
2. Indikator Kinerja Utama 2025-2029
3. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 400.10.11-6097 tahun 2025 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2025

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (*Good Governance*). Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Hal tersebut sejalan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan melaporkan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Untuk mendukung pelaksanaan peraturan tersebut, maka ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja yang dimaksud adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Sedangkan Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selama Tahun 2025. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2025 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

## 1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya LKIP Bappelitbangda Kota Ternate Tahun 2025 adalah dalam rangka melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap Instansi Pemerintah secara berjenjang wajib menyusun Laporan Pertanggungjawaban Kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tujuan penyusunan LKIP Bappelitbangda Kota Ternate Tahun 2025 adalah :

- 1) Mempertanggungjawabkan kinerja Bappelitbangda Kota Ternate kepada Walikota dan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*), dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (*good governance*) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas.
- 2) Memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan Kinerja internal Bappelitbangda.

## 1.3 Tugas Pokok, Fungsi PD dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate Tahun 2016 serta Peraturan Walikota Ternate Nomor 34.A Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Badan Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ternate. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Ternate, adalah unsur perencana penyelenggaraan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

BAPPELITBANGDA Kota Ternate mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. BAPPELITBANGDA Kota Ternate dalam menjalankan tugas pokoknya mempunyai fungsi sebagai berikut:

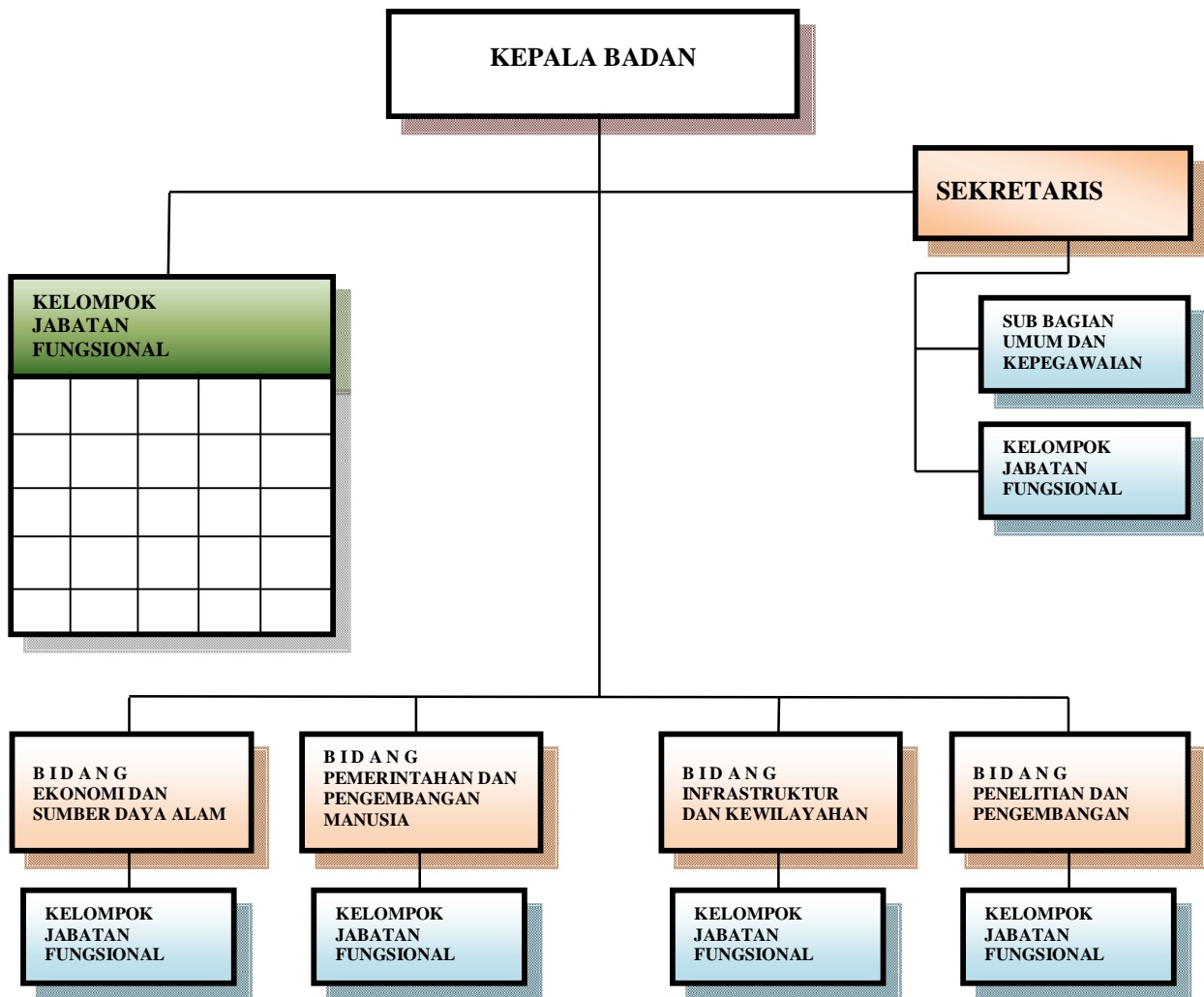
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan daerah;
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
4. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) serta dokumen perencanaan lainnya;
5. Penyusunan program-program tahunan baik yang dibiayai oleh Pemerintah Kota Ternate, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat;
6. Pelaksanaan koordinasi perencanaan-perencanaan dengan seluruh perangkat daerah;
7. Penyusunan program dan kegiatan seluruh perangkat daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Pelaksanaan koordinasi dan mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di daerah;
9. Penyusunan database dalam rangka pengembangan dan kelayakan setiap komponen kebijakan, program dan kegiatan;
10. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
11. Penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan;
12. Penyelenggaraan urusan tata usaha badan;
13. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah.

Stuktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai Peraturan Walikota Ternate Nomor 34.A Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ternate terdiri dari:

1. Kepala Badan

2. Sekretaris, yang terdiri atas:
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, yang terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, yang terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, yang terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan, yang terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Gambar 1.1**  
**Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Ternate**



#### 1.4 Permasalahan dan Isu Strategi Perangkat Daerah

Permasalahan adalah suatu kondisi atau situasi yang tidak diinginkan atau tidak sesuai dengan harapan, yang memerlukan penyelesaian atau penanganan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan.

Isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Permasalahan Bappelitbangda Kota Ternate dan isu Strategis disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 1.2**  
**Permasalahan & Isu Strategis Bappelitbangda Kota Ternate**

PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU STRATEGIS
Belum sepenuhnya tersedia data capaian pada perangkat daerah.	Meningkatkan kualitas Monev. perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan.	Meningkatkan kualitas data dan informasi pembangunan daerah yang smart, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan
Konsistensi perencanaan dan penganggaran masih perlu ditingkatkan	Mengoptimalkan penggunaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah dalam perencanaan, penganggaran, monev. Pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah
	Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat daerah Pemerintah Prov. & pusat dan spemangku kepentingan lainnya dalam rumusan kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kualitas dan kuatitas SDM belum optimal.	Meningkatkan kapasitas Aparatur Perencana dan Peneliti
Belum semua hasil penelitian ditindaklanjuti dan menjadi dasar pengambilan kebijakan.	Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah berbasis bukti ( <i>evidence based policy</i> )
Pengawasan inovasi belum berjalan optimal	Mengoptimalkan fasilitasi, pembinaan dan apresiasi terhadap inovasi daerah

## 1.5 Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Ternate Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

### **Bab I – Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.;

### **Bab II – Perencanaan dan Penetapan Kinerja**

Mengikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja);

### **Bab III – Akuntabilitas Kinerja**

Menguraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi pelapor, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja;

### **Bab IV – Penutup**

Menjelaskan tentang kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Ternate Tahun 2024 dan menguraikan upaya pemecahan masalah yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian Kinerja yang dimaksud adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcomes*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Adapun Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

#### 2.1. Rencana Kinerja Menengah (Rencana Strategis)

Pada Rencana Kinerja Menengah (Rencana Strategis) Bappelitbangda Kota Ternate memiliki 1 (satu) Tujuan dengan 2 (dua) Indikator Sasaran Strategis yang di jabarkan pada tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
**Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Ternate Tahun 2025-2029**

NSPK DAN Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran/ Program	Indikator Sasaran/Program	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
VISI : Mewujudkan Kota Ternate Yang Mandiri Dan Berkeadilan  MISI : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif, Bersih, Transparan, Dan Akuntabel Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik  TUJUAN : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik yang	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan		SAKIP	B	BB	BB	BB	BB	BB
		S1. Peningkatan Komponen Perencanaan Kinerja Dalam Nilai SAKIP	Komponen Kinerja Perencanaan (Bobot 30%)	20,21	20,77	21,44	21,69	22,2	22,63
		PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Presentase Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia	87%	90%	92%	94%	96%	97%
			Presentase Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	90%	92%	94%	96%	97%	98%
		Presentase Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	87%	90%	92%	94%	96%	97%	

NSPK DAN Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran/ Program	Indikator Sasaran/Program	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
Berbasis Digital  SASARAN : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Target Kinerja dan Anggaran RENJA-PD dengan RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	65%	70%	75%	80%	85%	90%
			Persentase Keselarasan Target Kinerja dan Anggaran RENJA-PD dengan RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	65%	70%	75%	80%	85%	90%
			Persentase Keselarasan Target Kinerja dan Anggaran RENJA-PD dengan RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	65%	70%	75%	80%	85%	90%
		S2. Peningkatan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	60	62,5	65	67,5	70	75
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	95,50%	95,8%	96,0%	96,3%	96,5%	97,0%
		PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase Fasilitas, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah /Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	18,73%	19,5%	20,3%	21,1%	22,0%	22,8%

Sumber: Renstra Bappelitbangda Kota Ternate Tahun 2025-2029

## 2.2. Indikator Kinerja Utama

Badan Perencanaan Pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), Target kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Ternate Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.3**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan**  
**Pengembangan Daerah Kota Ternate Tahun 2025**

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	B

### 2.3. Perjanjian Kinerja Badan

Perjanjian Kinerja BAPPELITBANGDA Kota Ternate Tahun 2025 telah ditetapkan 2 (dua) indikator sasaran Perangkat Daerah dan target yang ingin dicapai. Target kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Ternate tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan**  
**Pengembangan Daerah**  
**Kota Ternate Tahun 2025**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Peningkatan Komponen Perencanaan Kinerja Dalam Nilai SAKIP	Komponen Kinerja Perencanaan (Bobot 30%)	20,21
Peningkatan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	60

*Sumber: Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025*

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja pada perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah ditetapkan pada perubahan Anggaran Tahun 2025, lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.3**  
**Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis/Program**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah**  
**Kota Ternate Tahun 2025**

SASARAN STRATEGIS / PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
<b>S1. Peningkatan Komponen Perencanaan Kinerja Dalam Nilai SAKIP</b>	<b>4.068.512.282,80</b>
PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	3.229.296.210,50
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	839.216.072,30
<b>S2. Peningkatan Inovasi Daerah</b>	<b>2.618.954.634,00</b>
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2.618.954.634,00

*Sumber: DPA Perubahan Bappelitbangda, Tahun 2025*

## 2.4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan PD

Untuk memenuhi target kinerja Tahun 2025, terdapat 3 (tiga) Program Utama dengan 10 (sepuluh) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan serta 1 (satu) Program Penunjang dengan 5 (lima) kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Ternate yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah , sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah**  
**Kota Ternate Tahun 2025 dalam mendukung Tujuan dan sasaran PD**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<b>I. PROGRAM UTAMA</b>					
Meningkatnya akuntabilitas Kinerja pemerintah	Peningkatan Komponen Perencanaan Kinerja Dalam Nilai SAKIP	5. 01. 02	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Presentase Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia	87,00%
				Presentase Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	90,00%
				Presentase Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	87,00%
		5. 01. 02. 2.01	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>		
		5. 01. 02. 2.01 0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara
		5. 01. 02. 2.01 0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 Berita Acara
		5. 01. 02. 2.01 0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara
		5. 01. 02. 2.01 0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Koordinasi Musrenbang Kecamatan dan Komunitas	1 Berita Acara
		5. 01. 02. 2.01 0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen
		5. 01. 02. 2.02	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		
		5. 01. 02. 2.02 0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	TARGET
		<b>5. 01. 02. 2.03</b>	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		
		5. 01. 02. 2.03 0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan
		5. 01. 02. 2.03 0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5 Laporan
		<b>5 .01 .02 .2.04</b>	<b>Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</b>		
		5. 01 .02. 2.04. 0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Data dalam sistem Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1 Dokumen
		<b>5. 01. 03</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Persentase Keselarasan Target Kinerja dan Anggaran RENJA-PD dengan RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	65,00%
				Persentase Keselarasan Target Kinerja dan Anggaran RENJA-PD dengan RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	65,00%
				Persentase Keselarasan Target Kinerja dan Anggaran RENJA-PD dengan RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	65,00%
		<b>5. 01. 03. 2.01</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>		
		5. 01. 03. 2.01 .0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen
		5. 01. 03. 2.01 .0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan
		5. 01. 03. 2.01. 0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan	1 Laporan

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
			Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Manusia	
		5. 01. 03. 2.01 .0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan Singkronisasi dan Harmonisasi Program Pusat dan Daerah	1 Laporan
		<b>5. 01. 03. 2.02</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>		
		5. 01. 03. 2.02 .0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen
		5. 01. 03. 2.02 .0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Laporan Hasil Singkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan
		5. 01. 03. 2.02 .0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2 Laporan
		5. 01. 03. 2.02 .0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan
		<b>5. 01. 03. 2.03</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>		
		5. 01. 03. 2.03 .0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen
		5. 01. 03. 2.03 .0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan
		5. 01. 03. 2.03 .0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan
		5. 01. 03. 2.03 .0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan Hasil Singkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Peningkatan Inovasi Daerah	5 .05 .02	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	95,50%
		5 .05 .02 .2.02	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>		
		5 .05 .02 .2.02 .0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	4 Dokumen
		5 .05 .02 .2.02 .0009	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	1 Dokumen
		5 .05 .02 .2.02 .0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	2 Dokumen
		5 .05 .02 .2.03	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>		
		5 .05 .02 .2.03 .0002	Penelitian dan Pengembangan Industri dan Perdagangan	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Industri dan Perdagangan	1 Dokumen
		5 .05 .02 .2.03 .0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan Dan Pangan	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen
		5.05.02.2.04	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>		
		5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan
		5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan
<b>II. PROGRAM PENUNJANG</b>					
		5.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	SAKIP Bappelitbangda	BB
		5.01.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		
		5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen
		5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	1 Dokumen

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
		5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan
		5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan
		<b>5.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		
		5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan
		5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
		<b>5.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		
		5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
		5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
		5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
		5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket
		5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen
		5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
		5.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya Aplikasi	1 Paket
		<b>5.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		
		5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
		<b>5.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		
		5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit
		5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit

Sumber: RENJA Perubahan Bappelitbangda, Tahun 2025

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2025, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2025 dengan realisasinya. Untuk skala pengukuran kinerja dan predikatnya adalah sebagai berikut :

- a. Capaian kinerja  $91 \% \leq 100 \% =$  sangat tinggi
- b. Capaian Kinerja  $71 \% \leq 90 \% =$  tinggi
- c. Capaian Kinerja  $51 \% \leq 70 \% =$  sedang
- d. Capaian Kinerja  $\leq 50 \% =$  rendah

#### 3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah

##### 3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititikberatkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri.

Hasil capaian kinerja atas Indikator Kinerja Utama tahun 2025 sesuai dengan sasaran strategis yang ditetapkan disajikan dalam tabel 3.1 berikut:

**Tabel 3.1**  
**Capaian IKU Badan Perencanaan Pembangunan,**  
**Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Ternate Tahun 2025**

No.	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP Kota Ternate	B	Belum ada penilaian dari Kementerian PANRB	0%
<b>Rata-rata Tingkat Realisasi Capaian Kinerja</b>					<b>0%</b>

*Sumber: Hasil Analisis Indikator Kinerja Utama, Tahun 2025*

Realisasi kinerja atas Indikator Kinerja Utama tahun 2024 s/d 2025 yang ditetapkan disajikan dalam tabel 3.2 berikut:

**Tabel 3.2**  
**Realisasi IKU Badan Perencanaan Pembangunan,**  
**Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Ternate Tahun 2024 s/d 2025**

No.	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Pertumbuhan
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP Kota Ternate	B	Belum ada penilaian dari Kementerian PANRB	0

*Sumber: Hasil Analisis Indikator Kinerja, Tahun 2025*

Berdasarkan tabel 3.1 di atas, menunjukkan bahwa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 adalah sebesar **0,00 %**, hal ini dikarenakan sampai saat ini belum ada hasil penilaian SAKIP Pemerintah Kota Ternate tahun 2025 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

### 3.1.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Perangkat daerah

BAPPELITBANGDA Kota Ternate telah menetapkan 2 (dua) sasaran Perangkat Daerah sesuai dengan Renstra BAPPELITBANGDA dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu. Dari sasaran Perangkat Daerah tersebut terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang digunakan untuk mencapai target.

Capaian dari Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah disajikan pada tabel 3.3, berikut:

**Tabel 3.3**  
**Capaian Sasaran Bappelitbangda Kota Ternate Tahun 2025**

Sasaran PD	Indikator Sasaran/Program	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian
1. Peningkatan Komponen Perencanaan Kinerja Dalam Nilai SAKIP	Komponen Kinerja Perencanaan (Bobot 30%)	20,21	Belum ada penilaian dari Kementerian PANRB	0
2. Peningkatan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	60	44,26	73,77%

*Sumber: Hasil Analisis Indikator Kinerja, Tahun 2025*

Berdasarkan tabel 3.1 di atas, menunjukkan bahwa capaian Indikator sasaran 1 **Peningkatan Komponen Perencanaan Kinerja Dalam Nilai SAKIP** dengan indikator Komponen Kinerja Perencanaan (Bobot 30%) Tahun 2025 sebesar **0,00 %**, hal ini juga dikarenakan sampai saat ini belum ada hasil penilaian SAKIP Pemerintah Kota Ternate tahun 2025 untuk komponen Kinerja Perencanaan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Sedangkan capaian kinerja pada sasaran 2 **Peningkatan Inovasi Daerah** dengan indikator Indeks Inovasi Daerah sebesar **73, 77%** hal ini berdasarkan hasil penilaian indeks Inovasi Daerah oleh keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 400.10.11-6097 tahun 2025 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2025, untuk indeks inovasi Daerah Pemerintah Kota Ternate Tahun 2025 sebesar 44,26 hal ini masih dibawah target yang ditetapkan sebesar 60.

**Tabel 3.4**  
**Realisasi Sasaran Bappelitbangda Kota Ternate Tahun 2024 s/d 2025**

Sasaran PD	Indikator Sasaran/Program	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Pertumbuhan
Peningkatan Komponen Perencanaan Kinerja Dalam Nilai SAKIP	Komponen Kinerja Perencanaan (Bobot 30%)	18,1	Belum ada penilaian dari Kementerian PANRB	0
Peningkatan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	53,58	44,26	-21%

*Sumber: Hasil Analisis Indikator Kinerja, Tahun 2025*

Berdasarkan tabel 3.4 diatas menggambarkan bahwa perbandingan realisasi sasaran Bappelitbangda Kota Ternate Tahun 2024 dan 2025 untuk sasaran **Peningkatan Inovasi Daerah** terjadi penurunan sebesar -21%.

### 3.1.3 Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah

Capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititikberatkan pada sejauh mana program pembangunan daerah telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri.

Hasil capaian kinerja Program Pembangunan Daerah pada Bappelitbangda tahun 2025 disajikan dalam tabel 3.5 berikut:

**Tabel 3.5**  
**Capaian Program Badan Perencanaan Pembangunan,**  
**Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Ternate Tahun 2025**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PENANGGUNG JAWAB
<b>I. PROGRAM UTAMA</b>								
Meningkatnya akuntabilitas Kinerja pemerintah	Peningkatan Komponen Perencanaan Kinerja Dalam Nilai SAKIP	5. 01. 02	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Presentase Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia	87,00%	96,00%	110,34%	Kabid. Pemerintahan Pembangunan Manusia
				Presentase Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	90,00%	91,00%	101,11%	Kabid. Ekonomi dan Sumber Daya Alam
				Presentase Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	87,00%	88,16%	101,33%	Kabid. Infrastruktur dan Kewilayahan
		5. 01. 03	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Persentase Keselarasan Target Kinerja dan Anggaran RENJA-PD dengan RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	65,00%	90,41%	139,09%	Kabid. Pemerintahan Pembangunan Manusia
				Persentase Keselarasan Target Kinerja dan Anggaran RENJA-PD dengan RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	65,00%	83,17%	127,95%	Kabid. Ekonomi dan Sumber Daya Alam
				Persentase Keselarasan Target Kinerja dan Anggaran RENJA-PD dengan RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	65,00%	90,68%	139,51%	Kabid. Infrastruktur dan Kewilayahan
<b>Rata - Rata Capaian</b>							<b>119,89%</b>	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PENANGGUNG JAWAB
	Peningkatan Inovasi Daerah	5 .05 .02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	95,50%	86,00%	90,05%	Kabid. Penelitian dan Pengembangan
		5 .05 .03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah /Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	18,73%	14,63%	78,13%	Kabid. Penelitian dan Pengembangan
<b>Rata - rata Capaian</b>							<b>84,09%</b>	
<b>Rata - Rata Capaian Program Utama</b>							<b>85,29%</b>	
<b>II. PROGRAM PENUNJANG</b>								
		5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SAKIP Bappelitbangda	BB	BB	100,00%	Sekretaris Badan

*Sumber: Hasil Analisis Indikator Kinerja, Tahun 2025*

Berdasarkan tabel 3.5 di atas, menunjukkan bahwa capaian Indikator Kinerja **Program Utama** yang mendukung Sasaran Bappelitbangda Kota Ternate Tahun 2025 **sebesar 85,29 %**, Untuk capaian program yang mendukung Sasaran Peningkatan Komponen Perencanaan Kinerja Dalam Nilai SAKIP sebesar 119,89%, dan capaian program yang mendukung sasaran Peningkatan Inovasi Daerah sebesar 84,09%. Sedangkan Untuk capaian **Program Penunjang sebesar 100%**.

**Tabel 3.6**  
**Realisasi Program Badan Perencanaan Pembangunan,**  
**Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Ternate Tahun 2024 s/d 2025**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2024	REALISASI 2025	PERTUMBUHAN (%)
<b>I. PROGRAM UTAMA</b>							
Meningkatnya akuntabilitas Kinerja pemerintah	Peningkatan Komponen Perencanaan Kinerja Dalam Nilai SAKIP	5. 01. 02	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Presentase Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia	86,87%	96,00%	9,51%
				Presentase Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	89,36%	91,00%	1,80%
				Presentase Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	86,18%	88,16%	2,25%
		5. 01. 03	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Persentase Keselarasan Target Kinerja dan Anggaran RENJA-PD dengan RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	35,21%	90,41%	61,06%
				Persentase Keselarasan Target Kinerja dan Anggaran RENJA-PD dengan RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	37,23%	83,17%	55,24%
				Persentase Keselarasan Target Kinerja dan Anggaran RENJA-PD dengan RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	33,54%	90,68%	63,01%
<b>Rata - rata Capaian</b>							<b>32,14%</b>

	Peningkatan Inovasi Daerah	5 .05 .02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	95,35%	86,00%	-10,87%
		5 .05 .03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	17,07%	14,63%	-16,65%
<b>Rata - rata Capaian</b>							<b>-13,76%</b>
<b>II. PROGRAM PENUNJANG</b>							
		5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SAKIP Bappelitbangda	BB	BB	0,00%

Sumber: Hasil Analisis Indikator Kinerja, Tahun 2025

Berdasarkan tabel 3.6 di atas, menunjukkan bahwa Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Program Tahun 2024 dan 2025, untuk program utama yang mendukung sasaran peningkatan Komponen Perencanaan Kinerja Dalam Nilai SAKIP terjadi peningkatan realisasi sebesar sebesar 32,14%, sedangkan program yang mendukung sasaran Peningkatan Inovasi Daerah terjadi penurunan sebesar -13,76%.

### 3.1.4 Analisis Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil analisis terhadap kinerja pada Bappelitbangda Kota Ternate Tahun 2025 yang tercantum pada tabel di atas, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

#### A. Analisis Kinerja Sasaran Perangkat Daerah

1. Indikator Kinerja PERTAMA yaitu "**Komponen Kinerja Perencanaan (Bobot 30%)**". Indikator yang dimaksud untuk mendukung perolehan Nilai SAKIP Pemerintah Kota Ternate. Penghitungan realisasi indikator tersebut dapat di lihat dari hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ternate di tahun 2025 untuk komponen **Perencanaan Kinerja hasil** nilai realisasi belum ada dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), namun terkait dengan komponen kinerja perencanaan, Bappelitbangda telah melakukan berbagai upaya antara lain :

- a) Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah diformalkan dengan Perda/Peraturan/Keputusan Kepala daerah.
  - b) Memperbaiki indikator Kinerja pada perangkat daerah yang belum memenuhi kriteria SMART.
  - c) Rumusan Hasil (tujuan/ Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi Kinerja yang akan dicapai.
  - d) Memperbaiki target kinerja yang ditetapkan agar dapat dicapai, menantang dan realistis.
2. Indikator Kinerja KEDUA yaitu **“Indeks Inovasi Daerah”** diukur dari hasil indeks inovasi daerah yang dikeluarkan oleh Kementerian dalam Negeri, dari hasil penilaian indeks inovasi daerah Kota Ternate Tahun 2025 sebesar 44,26 sedangkan untuk target yang ditetapkan 2025 sebesar 60 hal ini menandakan pencapaian hanya sebesar 73,77%, dari hasil realisasi indeks inovasi daerah Kota Ternate 2025 jika dibandingkan dengan hasil di tahun 2024 terjadi penurunan untuk diketahui realisasi di tahun 2024 sebesar 53,58. Adapun hal-hal yang mempengaruhi terjadi penurunan nilai ini antara lain :
- a) Dokumen inovasi perangkat daerah yang difasilitasi tidak lengkap dalam sistem penilaian.
  - b) Minimnya anggaran Inovasi sehingga menjadi kendala dalam pengembangan inovasi daerah.
  - c) Jumlah inovasi perangkat daerah yang difasilitasi oleh bappelitbangda berkurang dan tidak berkelanjutan.

Untuk kedepan dalam upaya peningkatan Indeks inovasi daerah maka diperlukan upaya-upaya sebagai berikut :

- a) Semua inovasi harus didokumentasikan dengan baik serta melakukan evaluasi dampak inovasi terhadap pelayanan publik dan pembangunan daerah.
- b) Penyediaan anggaran khusus inovasi di perangkat daerah
- c) Bekerjasama dengan perguruan tinggi, swasta dan komunitas dalam pengembangan inovasi

## B. Analisis Kinerja Program Perangkat Daerah

1. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, terdapat 3 indikator Kinerja yang mendukung capaian program tersebut antara lain : (1) Presentase Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia, (2) Presentase Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, dan (3) Presentase Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Adapun rumus defenisi operasionalnya dari ketiga indikator diatas adalah:

$$= \frac{\text{Jumlah Realisasi Program Bidang X}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah Bidang X}} \times 100$$

Sesuai dengan hasil pada tabel 3.5 rata rata capaian ketiga indikator tersebut pada tahun 2025 sebesar 104,26% dan terjadi rata-rata peningkatan realisasi dari tahun 2024 sebesar 4,25%, hal ini menandakan bahwa realisasi telah melampaui target-target yang telah ditetapkan, adapun hal-hal yang menjadi peningkatan capaian dari ketiga indikator tersebut antara lain :

- a) Semakin baik kualitas perencanaan pada perangkat daerah yang dimana target kinerja dapat diukur;
  - b) Melakukan monev. pelaksanaan Program Pembangunan Daerah dilakukan berkala;
  - c) Keselarasan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan semakin baik
2. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, terdapat 3 indikator Kinerja yang mendukung capaian program tersebut antara lain : (1) Persentase Keselarasan Target Kinerja dan Anggaran RENJA-PD dengan RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, (2) Persentase Keselarasan Target Kinerja dan Anggaran RENJA-PD dengan RPJMD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, dan (3) Persentase Keselarasan Target Kinerja dan Anggaran RENJA-PD dengan RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Adapun rumus defenisi operasionalnya dari ketiga indikator diatas adalah:

$$= \frac{\text{Target Kinerja dan Anggaran RENJA_PD Bidang X}}{\text{Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Bidang X}} \times 100$$

Sesuai dengan hasil pada tabel 3.5 rata rata capaian ketiga indikator tersebut pada tahun 2025 sebesar 135,52% dan terjadi rata-rata peningkatan realisasi

dari tahun 2024 sebesar 59,77%, hal ini menandakan bahwa realisasi telah melampaui target-target yang telah ditetapkan, adapun hal-hal yang menjadi peningkatan capaian dari ketiga indikator tersebut antara lain :

- a) Program yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan daerah dan kemampuan anggaran;
- b) Program yang direncanakan benar-benar menjadi dasar pelaksanaan;
- c) Program yang direncanakan telah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah dan RPJMD.

3. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH, terdapat 1 indikator Kinerja yaitu Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Adapun rumus defenisi operasionalnya dari indikator diatas adalah:

$$= \frac{\text{Jumlah rekomendasi Hasil Penelitian yang di tindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi Hasil Penelitian}} \times 100$$

Sesuai dengan hasil pada tabel 3.5 capaian indikator tersebut pada tahun 2025 sebesar 90,05% dan terjadi rata-rata penurunan realisasi dari tahun 2024 sebesar -10,87%, adapun hal-hal yang menjadi penurunan antara lain :

- a) Penelitian yang dilakukan tidak sesuai dengan permasalahan pembangunan daerah sehingga sulit diterapkan
- b) Hasil Penelitian tidak tersosialisasi dengan baik ke OPD Pelaksana
- c) Pengambil kebijakan belum menjadikan hasil penelitian sebagai dasar pengambil keputusan

4. PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH, terdapat 1 indikator Kinerja yaitu Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah Adapun rumus defenisi operasionalnya dari indikator diatas adalah:

$$= \frac{\text{Jumlah PD Yang difasilitasi Inovasi Daerah}}{\text{Jumlah PD}} \times 100$$

Sesuai dengan hasil pada tabel 3.5 capaian indikator tersebut pada tahun 2025 sebesar 78,13% dan terjadi rata-rata penurunan realisasi dari tahun 2024 sebesar -16,65%, adapun hal-hal yang menjadi penurunan antara lain :

- a) Dokumen inovasi perangkat daerah yang difasilitasi tidak lengkap dalam sistem penilaian.
- b) Minimnya anggaran Inovasi sehingga menjadi kendala dalam pengembangan inovasi daerah.
- c) Jumlah inovasi perangkat daerah yang difasilitasi oleh bappelitbangda berkurang dan tidak berkelanjutan.

### 3.2 Realisasi Anggaran Perangkat Daerah

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ternate.

Pada tahun 2025 belanja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Ternate terdiri atas belanja operasi dan belanja modal dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Berikut diuraikan realisasi anggaran berdasarkan Sasaran strategis ini didukung dengan 3 (tiga) program dan 10 (sepuluh) kegiatan serta 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan, dengan total anggaran Rp. 6.687.466.916,80 Dari total anggaran tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp. 6.665.117.350,00 dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 99,67 %, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.7**  
**Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Bappelitbangda Kota Ternate**  
**Dalam Mendukung Pencapaian Sasaran Perangkat Daerah**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU DPA PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	%
Meningkatnya akuntabilitas Kinerja pemerintah				6.687.466.916,80	6.665.117.350,00	99,67
	Peningkatan Komponen Perencanaan Kinerja Dalam Nilai SAKIP			4.068.512.282,80	4.046.162.716,00	99,45
		5. 01. 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	3.229.296.210,50	3.227.515.503,00	99,94

		<b>5.01.02.2.01</b>	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>2.149.454.743,40</b>	<b>2.149.384.162,00</b>	<b>100,00</b>
		5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	199.953.211,00	199.953.211,00	100,00
		5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	399.999.908,50	399.999.908,00	100,00
		5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	399.999.796,00	399.999.796,00	100,00
		5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	274.999.749,50	274.999.749,00	100,00
		5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	874.502.078,40	874.431.498,00	99,99
		<b>5.01.02.2.02</b>	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>300.050.000,00</b>	<b>300.050.000,00</b>	<b>100,00</b>
		5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	300.050.000,00	300.050.000,00	100,00
		<b>5.01.02.2.03</b>	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>618.677.514,40</b>	<b>617.797.513,00</b>	<b>99,86</b>
		5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	99.994.560,00	99.994.560,00	100,00
		5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	518.682.954,40	517.802.953,00	99,83
		<b>5.01.02.2.04</b>	<b>Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</b>	<b>161.113.952,70</b>	<b>160.283.828,00</b>	<b>99,48</b>
		5.01.02.2.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	161.113.952,70	160.283.828,00	99,48
		<b>5.01.03</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>839.216.072,30</b>	<b>818.647.213,00</b>	<b>97,55</b>
		<b>5.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan</b>	<b>413.150.827,60</b>	<b>401.270.257,00</b>	<b>97,12</b>

			<b>Pembangunan Manusia</b>			
		5. 01. 03. 2.01 .0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	123.398.825,50	123.018.257,00	99,69
		5. 01. 03. 2.01 .0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	58.572.023,60	58.572.022,00	100,00
		5. 01. 03. 2.01. 0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	43.984.336,00	43.984.336,00	100,00
		5. 01. 03. 2.01 .0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	187.195.642,50	175.695.642,00	93,86
		<b>5. 01. 03. 2.02</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>250.199.686,20</b>	<b>250.199.458,00</b>	<b>100,00</b>
		5. 01. 03. 2.02 .0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	62.165.491,30	62.165.491,00	100,00
		5. 01. 03. 2.02 .0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	79.114.471,30	79.114.244,00	100,00
		5. 01. 03. 2.02 .0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	55.698.861,30	55.698.861,00	100,00
		5. 01. 03. 2.02 .0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	53.220.862,30	53.220.862,00	100,00
		<b>5. 01. 03. 2.03</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah</b>	<b>175.865.558,50</b>	<b>167.177.498,00</b>	<b>95,06</b>
		5. 01. 03. 2.03 .0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen	65.103.610,50	58.312.550,00	89,57

			Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)			
		5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	23.179.811,00	23.179.811,00	100,00
		5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	17.099.835,00	17.099.835,00	100,00
		5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	70.482.302,00	68.585.302,00	97,31
	<b>Peningkatan Inovasi Daerah</b>			<b>2.618.954.634,00</b>	<b>2.618.954.634,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>5.05.02</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>2.618.954.634,00</b>	<b>2.618.954.634,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>5.05.02.2.02</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>1.850.000.000,00</b>	<b>1.850.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
		5.05.02.2.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	100,00
		5.05.02.2.02.0009	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
		5.05.02.2.02.0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00
		<b>5.05.02.2.03</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>400.000.000,00</b>	<b>400.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
		5.05.02.2.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Pendustrian dan Perdagangan	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
		5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan Dan Pangan	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00
		<b>5.05.02.2.04</b>	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>368.954.634,00</b>	<b>368.954.634,00</b>	<b>100,00</b>
		5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	223.498.143,00	223.498.143,00	100,00
		5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang	145.456.491,00	145.456.491,00	100,00

Sumber: Hasil Analisis Bappelitbangda, Tahun 2025

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Dari sasaran strategis telah memenuhi capaian target sasaran pada tahun 2026 dengan kategori **Tinggi**. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen untuk mewujudkan Tujuan Organisasi. Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran strategis tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Bappelitbangda Kota Ternate untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh karena itu telah dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu pembangunan di Kota Ternate.

Sebagai bagian penutup dari LKJIP Bappelitbangda Kota Ternate dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2025, hasil capaian kinerja sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Bappelitbangda Kota Ternate memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan.

### 4.2 Upaya Pemecahan Masalah

Dalam kurun waktu kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Bappelitbangda Kota Ternate diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan perencanaan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan. Untuk mewujudkan harapan diatas, beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain sebagai berikut:

1. Mengantisipasi sering terjadinya perubahan peraturan/pedoman penyelenggaraan perencanaan pembangunan.
2. Meningkatkan koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dengan menyikapi secara arif dan bijaksana pemberlakuan peraturan perundangan tentang perencanaan dan keuangan negara.
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap mekanisme dan kredibilitas perencanaan.
4. Meningkatkan kualitas SDM perencana terhadap penguasaan keahlian (*skill*) fungsional perencanaan yang sesuai tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda Kota Ternate.
5. Meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan di tingkat basis untuk meningkatkan efektivitas proses perencanaan.
6. Memantapkan pengelolaan dan pemanfaatan data, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.
8. Memiliki dan membangun jaringan *stakeholders* yang membantu proses perencanaan di daerah.
7. Memantapkan koordinasi perencanaan pembangunan antar SKPD guna mendukung terwujudnya perencanaan yang terintegrasi dan sinergis.
8. Menyusun *standard operating procedure* (SOP) perencanaan.
9. Menyediakan alat dan metode penilaian kelayakan dalam penetapan skala prioritas kegiatan.

# LAMPIRAN



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA TERNATE  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ir. THAMRIN MARSAOLY, SP.M.Sc**

Jabatan : **KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA  
TERNATE**

Selanjutya disebut pihak *pertama*

Nama : **M. TAUHID SOLEMAN**

Jabatan : **WALIKOTA TERNATE**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak *kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ternate, 22 Oktober 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



**M. TAUHID SOLEMAN**



**Ir. THAMRIN MARSAOLY, SP.M.Sc**

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA BADAN**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Peningkatan Komponen Perencanaan Kinerja dalam Nilai SAKIP Kota Ternate	Komponen Kinerja Perencanaan (Bobot 30%)	20,21%
2	Peningkatan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	60,00%

Program	Anggaran	Keterangan
1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Rp. 9.057.391.352,70	
2 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp. 3.229.296.210,50	
3 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp. 839.216.072,30	
4 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp. 2.618.954.634,00	

Ternate, 22 Oktober 2025

**WALIKOTA TERNATE**



**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KOTA TERNATE**





## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA TERNATE BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RONNY ARIES SETYONO, ST, M.Si**

Jabatan : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Selanjutnya disebut pihak *pertama*

Nama : **Ir. THAMRIN MARSAOLY, SP.M.Sc**

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak *kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ternate, 22 Oktober 2025

Pihak Kedua,

**Ir. THAMRIN MARSAOLY, SP.M.Sc**  
Nip. 19780704 200501 1 012

Pihak Pertama,

**RONNY ARIES SETYONO, ST, M.Si**  
Nip. 19790417 200604 1 009

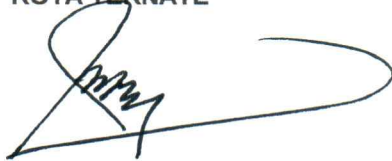
**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
SEKRETARIS BADAN**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Peningkatan Komponen Perencanaan Kinerja dalam Nilai SAKIP Kota Ternate	SAKIP Bappelitbangda	BB

	Program	Anggaran	Ket.
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 9.057.391.352,70	

Ternate, 22 Oktober 2025

**KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH  
KOTA TERNATE**



Ir. THAMRIN MARSAOLY, SP.M.Sc  
Nip. 19780704 200501 1 012

**SEKRETARIS BADAN**



RONNY ARIES SETYONO, ST, M.Si  
Nip. 19790417 200604 1 009



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA TERNATE  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUNISA, ST**  
Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Selanjutya disebut pihak *pertama*

Nama : **Ir. THAMRIN MARSAOLY, SP.M.Sc**  
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak *kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ternate, 22 Oktober 2025

**Pihak Kedua,**

**Ir. THAMRIN MARSAOLY, SP.M.Sc**  
Nip. 19780704 200501 1 012

**Pihak Pertama,**

**MUNISA, ST**  
Nip. 19790104 200501 2 012

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Peningkatan Komponen Perencanaan Kinerja dalam Nilai SAKIP Kota Ternate	Presentase Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	87%
		Persentase Keselarasan Target Kinerja dan Anggaran RENJA-PD dengan RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	65%

	Program		Anggaran	Ket.
1	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp.	141.833.214,50	
2	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp.	413.150.827,60	

Ternate, 22 Oktober 2025

**KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH  
KOTA TERNATE**



**Ir. THAMRIN MARSAOLY, SP.M.Sc**  
Nip. 19780704 200501 1 012

**KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN  
PEMBANGUNAN MANUSIA**



**MUNISA, ST**  
Nip. 19790104 200501 2 012



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA TERNATE BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dr. Hj. ERNI TJAN,SE.,M.Si**  
Jabatan : Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Selanjutnya disebut pihak *pertama*

Nama : **Ir. THAMRIN MARSAOLY, SP.M.Sc**  
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak *kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ternate, 22 Oktober 2025

**Pihak Kedua,**

**Ir. THAMRIN MARSAOLY, SP.M.Sc**  
Nip. 19780704 200501 1 012

**Pihak Pertama,**

**Dr. Hj. ERNI TJAN,SE.,M.Si**  
Nip. 19680929 199201 2 200

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Peningkatan Komponen Perencanaan Kinerja dalam Nilai SAKIP Kota Ternate	Presentase Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	90%
		Persentase Keselarasan Target Kinerja dan Anggaran RENJA-PD dengan RPJMD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	65%

	Program		Anggaran	Ket.
1	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp.	91.344.736,90	
2	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp.	250.199.686,20	

Ternate, 22 Oktober 2025

**KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH  
KOTA TERNATE**

**Ir. THAMRIN MARSAOLY, SP.M.Sc.**  
Nip. 19780704 200501 1 012

**KEPALA BIDANG EKONOMI DAN SUMBER  
DAYA ALAM**

**Dr. Hj. ERNI TJAN, SE., M.Si**  
Nip. 19680929 199201 2 200



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA TERNATE BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **M SAIFULLAH, ST**  
Jabatan : Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Selanjutnya disebut pihak *pertama*

Nama : **Ir. THAMRIN MARSAOLY, SP.M.Sc**  
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak *kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ternate, 22 Oktober 2025

Pihak Kedua,

**Ir. THAMRIN MARSAOLY, SP.M.Sc**  
Nip. 19780704 200501 1 012

Pihak Pertama,

**M. SAIFULLAH, ST**  
Nip. 19761103 200212 1 007

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Peningkatan Komponen Perencanaan Kinerja dalam Nilai SAKIP Kota Ternate	Presentase Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	87%
		Persentase Keselarasan Target Kinerja dan Anggaran RENJA-PD dengan RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	65%

	Program		Anggaran	Ket.
1	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp.	117.538.543,00	
2	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp.	175.865.558,50	

Ternate, 22 Oktober 2025

**KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH  
KOTA TERNATE**



**Ir. THAMRIN MARSAOLY, SP.M.Sc**  
Nip. 19780704 200501 1 012

**KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN  
KEWILAYAHAN**



**M. SAIFULLAH, ST**  
Nip. 19761103 200212 1 007



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA TERNATE  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **LASMIYATI, S.SI, ME**  
Jabatan : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan

Selanjutya disebut pihak *pertama*

Nama : **Ir. THAMRIN MARSAOLY, SP.M.Sc**  
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak *kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ternate, 22 Oktober 2025

**Pihak Kedua,**

**Ir. THAMRIN MARSAOLY, SP.M.Sc**  
Nip. 19780704 200501 1 012

**Pihak Pertama,**

**LASMIYATI, S.SI, ME**  
Nip. 19790106 200212 2 005

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Peningkatan Inovasi Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	95,50%
		Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	18,73%

	Program		Anggaran	Ket.
1	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp.	2.618.954.634,00	

Ternate, 22 Oktober 2025

**KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH  
KOTA TERNATE**



Ir. THAMRIN MARSAOLY, SP.M.Sc  
Nip. 19780704 200501 1 012

**KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN**



LASMİYATI, S.SI, ME  
Nip. 19790106 200212 2 005



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA TERNATE BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ABUBAKAR ASSAGAF, SE**  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Selanjutnya disebut pihak *pertama*

Nama : **RONNY ARIES SETYONO, ST, M.Si**  
Jabatan : Sekertaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak *kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ternate, 22 Oktober 2025

Pihak Kedua,

**RONNY ARIES SETYONO, ST, M.Si**  
Nip. 19790417 200604 1 009

Pihak Pertama,

**ABUBAKAR ASSAGAF, SE**  
Nip. 19800711/200312 1 005

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Peningkatan Komponen Perencanaan Kinerja dalam Nilai SAKIP Kota Ternate	Jumlah Paket Penyediaan administrasi Umum	4 Paket
		Jumlah BMD yang Dipelihara	7 Unit

	Kegiatan		Anggaran	Ket.
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	399.862.998,80	
2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	113.453.300,00	

Ternate, 22 Oktober 2025

**SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH  
KOTA TERNATE**



**RONNY ARIES SETYONO, ST, M.Si**  
Nip. 19790417 200604 1 009

**KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN  
KEPEGAWAIAN**



**ABUBAKAR ASSAGAF, SE**  
Nip. 19800711 200312 1 005

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**  
**KOTA TERNATE TAHUN 2025- 2029**

Kinerja Utama (Tujuan / Sasaran)	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan/ Penjelasan	Satuan	Sumber Data	Pelaksana/ Penanggung Jawab
1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	2 Nilai SAKIP Kota Ternate	3 Nilai SAKIP Kota Ternate	4 Nilai	5 Penilaian SAKIP Kota Ternate	6 Sekretariat, Bidang Infrastruktur & Kewilayahan, Bidang Ekonomi & SDA, dan Bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia, Bidang Penelitian dan Pengembangan

**KEPALA BAPPENAS SDA Kota Ternate**

  
**Dr. THAMRIN MARSAOLY, SP.M.Sc**  
 NID. 29780704200501 1 012



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 400.10.11 – 6097 TAHUN 2025

TENTANG

INDEKS INOVASI DAERAH  
PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2025

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Kementerian Dalam Negeri melakukan penilaian terhadap laporan penerapan inovasi daerah dan mengusulkan calon penerima penghargaan inovasi daerah;
- b. Bahwa untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pengukuran indeks inovasi daerah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan atau Insentif Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 333);

- Memperhatikan :
1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2025 Revisi Ke-9 (Sembilan) Nomor SP DIPA-010.11.1.403222/2025 tanggal 17 November 2025;
  2. Berita Acara Hasil Validasi dan *Quality Control* Inovasi Urusan Pemerintahan Dalam Negeri Prioritas I Tahun 2025 Nomor 000.10/4351/BSKDN tanggal 23 Oktober 2025;
  3. Berita Acara Hasil Validasi dan *Quality Control* Inovasi Urusan Pemerintahan Dalam Negeri Prioritas II Tahun 2025 Nomor 000.10/4488/BSKDN tanggal 29 Oktober 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG INDEKS INOVASI DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2025.

KESATU : Melakukan pengukuran Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dengan cara menganalisis variabel dan indikator Indeks Inovasi Daerah.

- KEDUA : Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah laporan informasi data inovasi daerah berdasarkan hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah yang telah divalidasi dan dilakukan *quality control* oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri dengan melibatkan Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (UKKPPM) *Scientific Modeling, Application, Research, and Training for City-Centered Innovation and Technology* (SMART CITY) Universitas Indonesia dan Direktorat Inovasi dan Kekayaan Intelektual Universitas Hasanuddin.
- KETIGA : Menetapkan Indeks Inovasi daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2025 dengan kategori sangat inovatif, inovatif, kurang inovatif dan tidak dapat dinilai, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Desember 2025  
MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
5. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
6. Ketua Ombudsman;
7. Gubernur seluruh Indonesia; dan
8. Bupati dan Wali Kota seluruh Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum



Dr. Asmawa, AP., M.Si  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP 197410151993111003

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 400.10.11 – 6097 TAHUN 2025  
TENTANG  
INDEKS INOVASI DAERAH PROVINSI,  
KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2025

INDEKS INOVASI DAERAH  
PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2025

A. Kategori Provinsi

Rekapitulasi:

- 1) Sangat Inovatif : 8 Provinsi
- 2) Inovatif : 23 Provinsi
- 3) Kurang Inovatif : 7 Provinsi
- 4) Tidak Dapat Dinilai (*Disclaimer*) : 0 Provinsi

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
1.	Provinsi Jawa Timur	90,84	Sangat Inovatif
2.	Provinsi Sumatera Barat	86,96	Sangat Inovatif
3.	Provinsi Jawa Barat	85,05	Sangat Inovatif
4.	Provinsi DKI Jakarta	82,93	Sangat Inovatif
5.	Provinsi Jawa Tengah	82,63	Sangat Inovatif
6.	Provinsi Sumatera Selatan	81,23	Sangat Inovatif
7.	Provinsi Bali	77,04	Sangat Inovatif
8.	Provinsi Nusa Tenggara Barat	73,25	Sangat Inovatif
9.	Provinsi Sumatera Utara	64,79	Inovatif
10.	Provinsi Maluku Utara	63,64	Inovatif
11.	Provinsi Banten	63,35	Inovatif
12.	Provinsi Sulawesi Selatan	62,35	Inovatif
13.	Provinsi Aceh	62,23	Inovatif
14.	Provinsi Kalimantan Timur	59,90	Inovatif
15.	Provinsi Jambi	59,75	Inovatif
16.	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	59,70	Inovatif
17.	Provinsi Sulawesi Tenggara	58,16	Inovatif
18.	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	57,85	Inovatif
19.	Provinsi Sulawesi Tengah	57,12	Inovatif
20.	Provinsi Gorontalo	55,01	Inovatif
21.	Provinsi Lampung	52,89	Inovatif
22.	Provinsi Kepulauan Riau	52,85	Inovatif
23.	Provinsi Riau	52,33	Inovatif
24.	Provinsi Kalimantan Barat	51,68	Inovatif
25.	Provinsi Kalimantan Utara	50,84	Inovatif
26.	Provinsi Kalimantan Selatan	49,82	Inovatif
27.	Provinsi Nusa Tenggara Timur	48,50	Inovatif
28.	Provinsi Sulawesi Barat	47,76	Inovatif
29.	Provinsi Papua Tengah	45,83	Inovatif
30.	Provinsi Maluku	45,61	Inovatif
31.	Provinsi Bengkulu	40,41	Inovatif
32.	Provinsi Sulawesi Utara	38,66	Kurang Inovatif
33.	Provinsi Kalimantan Tengah	36,99	Kurang Inovatif
34.	Provinsi Papua	32,79	Kurang Inovatif
35.	Provinsi Papua Selatan	27,60	Kurang Inovatif

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
36.	Provinsi Papua Barat	17,14	Kurang Inovatif
37.	Provinsi Papua Pegunungan	3,80	Kurang Inovatif
38.	Provinsi Papua Barat Daya	1,20	Kurang Inovatif

B. Kategori Kabupaten

Rekapitulasi:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1) Sangat Inovatif                           | :69 Kabupaten  |
| 2) Inovatif                                  | :231 Kabupaten |
| 3) Kurang Inovatif                           | :100 Kabupaten |
| 4) Tidak Dapat Dinilai ( <i>Disclaimer</i> ) | :15 Kabupaten  |

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
1.	Kabupaten Balangan	96,80	Sangat Inovatif
2.	Kabupaten Lamongan	95,23	Sangat Inovatif
3.	Kabupaten Banyuwangi	94,84	Sangat Inovatif
4.	Kabupaten Bogor	94,40	Sangat Inovatif
5.	Kabupaten Wonogiri	94,25	Sangat Inovatif
6.	Kabupaten Bangka	93,71	Sangat Inovatif
7.	Kabupaten Bangkalan	93,11	Sangat Inovatif
8.	Kabupaten Tabalong	92,09	Sangat Inovatif
9.	Kabupaten Malang	91,70	Sangat Inovatif
10.	Kabupaten Blora	91,68	Sangat Inovatif
11.	Kabupaten Sidoarjo	91,54	Sangat Inovatif
12.	Kabupaten Sragen	91,11	Sangat Inovatif
13.	Kabupaten Boyolali	89,42	Sangat Inovatif
14.	Kabupaten Sampang	89,05	Sangat Inovatif
15.	Kabupaten Temanggung	88,88	Sangat Inovatif
16.	Kabupaten Ngawi	88,58	Sangat Inovatif
17.	Kabupaten Ogan Ilir	88,22	Sangat Inovatif
18.	Kabupaten Situbondo	86,65	Sangat Inovatif
19.	Kabupaten Magelang	86,15	Sangat Inovatif
20.	Kabupaten Pamekasan	86,15	Sangat Inovatif
21.	Kabupaten Bantul	83,64	Sangat Inovatif
22.	Kabupaten Klaten	83,49	Sangat Inovatif
23.	Kabupaten Mesuji	82,65	Sangat Inovatif
24.	Kabupaten Padang Pariaman	82,48	Sangat Inovatif
25.	Kabupaten Trenggalek	81,40	Sangat Inovatif
26.	Kabupaten Tulungagung	81,29	Sangat Inovatif
27.	Kabupaten Sumedang	80,49	Sangat Inovatif
28.	Kabupaten Jember	80,32	Sangat Inovatif
29.	Kabupaten Bandung	79,83	Sangat Inovatif
30.	Kabupaten Pati	79,60	Sangat Inovatif
31.	Kabupaten Muara Enim	79,45	Sangat Inovatif
32.	Kabupaten Lampung Utara	77,78	Sangat Inovatif
33.	Kabupaten Tegal	77,59	Sangat Inovatif
34.	Kabupaten Purworejo	75,45	Sangat Inovatif
35.	Kabupaten Tangerang	75,11	Sangat Inovatif
36.	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	75,01	Sangat Inovatif
37.	Kabupaten Grobogan	74,76	Sangat Inovatif

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
38.	Kabupaten Blitar	73,91	Sangat Inovatif
39.	Kabupaten Pasuruan	73,80	Sangat Inovatif
40.	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	73,59	Sangat Inovatif
41.	Kabupaten Hulu Sungai Utara	73,58	Sangat Inovatif
42.	Kabupaten Tapin	72,76	Sangat Inovatif
43.	Kabupaten Bulungan	72,53	Sangat Inovatif
44.	Kabupaten Banyuasin	71,94	Sangat Inovatif
45.	Kabupaten Bangli	71,92	Sangat Inovatif
46.	Kabupaten Aceh Jaya	70,73	Sangat Inovatif
47.	Kabupaten Kudus	70,46	Sangat Inovatif
48.	Kabupaten Empat Lawang	70,44	Sangat Inovatif
49.	Kabupaten Kulon Progo	70,12	Sangat Inovatif
50.	Kabupaten Banggai	70,07	Sangat Inovatif
51.	Kabupaten Dompu	70,06	Sangat Inovatif
52.	Kabupaten Jombang	69,86	Sangat Inovatif
53.	Kabupaten Tuban	69,41	Sangat Inovatif
54.	Kabupaten Brebes	69,10	Sangat Inovatif
55.	Kabupaten Madiun	69,08	Sangat Inovatif
56.	Kabupaten Sukoharjo	68,97	Sangat Inovatif
57.	Kabupaten Lampung Selatan	68,43	Sangat Inovatif
58.	Kabupaten Tabanan	68,26	Sangat Inovatif
59.	Kabupaten Bangka Tengah	68,10	Sangat Inovatif
60.	Kabupaten Pringsewu	67,15	Sangat Inovatif
61.	Kabupaten Dharmasraya	66,80	Sangat Inovatif
62.	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	66,50	Sangat Inovatif
63.	Kabupaten Pekalongan	66,35	Sangat Inovatif
64.	Kabupaten Tanggamus	66,32	Sangat Inovatif
65.	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	66,14	Sangat Inovatif
66.	Kabupaten Klungkung	66,09	Sangat Inovatif
67.	Kabupaten Sorong	66,09	Sangat Inovatif
68.	Kabupaten Minahasa Utara	65,68	Sangat Inovatif
69.	Kabupaten Mojokerto	65,35	Sangat Inovatif
70.	Kabupaten Bintan	64,47	Inovatif
71.	Kabupaten Morowali	64,43	Inovatif
72.	Kabupaten Lombok Tengah	64,20	Inovatif
73.	Kabupaten Kendal	64,11	Inovatif
74.	Kabupaten Sumba Timur	64,06	Inovatif
75.	Kabupaten Deli Serdang	64,02	Inovatif
76.	Kabupaten Mamuju Tengah	63,82	Inovatif
77.	Kabupaten Gianyar	63,69	Inovatif
78.	Kabupaten Sukabumi	63,61	Inovatif
79.	Kabupaten Tulang Bawang	63,54	Inovatif
80.	Kabupaten Bondowoso	63,41	Inovatif
81.	Kabupaten Kebumen	63,41	Inovatif
82.	Kabupaten Lumajang	63,20	Inovatif
83.	Kabupaten Buleleng	62,96	Inovatif
84.	Kabupaten Pacitan	62,84	Inovatif
85.	Kabupaten Banyumas	62,55	Inovatif
86.	Kabupaten Halmahera Selatan	62,42	Inovatif
87.	Kabupaten Sleman	62,29	Inovatif
88.	Kabupaten Bengkulu Selatan	62,27	Inovatif
89.	Kabupaten Semarang	62,14	Inovatif

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
90.	Kabupaten Bulukumba	62,10	Inovatif
91.	Kabupaten Barito Selatan	61,78	Inovatif
92.	Kabupaten Magetan	61,71	Inovatif
93.	Kabupaten Cilacap	61,67	Inovatif
94.	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	61,63	Inovatif
95.	Kabupaten Halmahera Tengah	61,47	Inovatif
96.	Kabupaten Sambas	60,94	Inovatif
97.	Kabupaten Banjar	60,71	Inovatif
98.	Kabupaten Pematang	60,65	Inovatif
99.	Kabupaten Nganjuk	60,49	Inovatif
100.	Kabupaten Karo	60,36	Inovatif
101.	Kabupaten Pasaman Barat	60,17	Inovatif
102.	Kabupaten Bojonegoro	59,93	Inovatif
103.	Kabupaten Karanganyar	59,89	Inovatif
104.	Kabupaten Gunung Mas	59,83	Inovatif
105.	Kabupaten Kutai Kartanegara	59,81	Inovatif
106.	Kabupaten Ogan Komering Ilir	59,69	Inovatif
107.	Kabupaten Pelalawan	59,65	Inovatif
108.	Kabupaten Barru	59,28	Inovatif
109.	Kabupaten Lampung Barat	59,03	Inovatif
110.	Kabupaten Majalengka	59,00	Inovatif
111.	Kabupaten Pasaman	58,91	Inovatif
112.	Kabupaten Karangasem	58,86	Inovatif
113.	Kabupaten Lombok Timur	58,74	Inovatif
114.	Kabupaten Lombok Utara	58,54	Inovatif
115.	Kabupaten Sumenep	58,52	Inovatif
116.	Kabupaten Kampar	58,43	Inovatif
117.	Kabupaten Belitung Timur	58,29	Inovatif
118.	Kabupaten Malinau	58,21	Inovatif
119.	Kabupaten Gresik	57,98	Inovatif
120.	Kabupaten Lebak	57,79	Inovatif
121.	Kabupaten Bekasi	57,71	Inovatif
122.	Kabupaten Batu Bara	57,64	Inovatif
123.	Kabupaten Subang	57,29	Inovatif
124.	Kabupaten Garut	57,22	Inovatif
125.	Kabupaten Luwu Timur	56,87	Inovatif
126.	Kabupaten Pesisir Selatan	56,75	Inovatif
127.	Kabupaten Humbang Hasundutan	56,43	Inovatif
128.	Kabupaten Tanah Laut	56,40	Inovatif
129.	Kabupaten Kotawaringin Timur	56,34	Inovatif
130.	Kabupaten Bangka Selatan	56,26	Inovatif
131.	Kabupaten Probolinggo	56,21	Inovatif
132.	Kabupaten Cirebon	56,16	Inovatif
133.	Kabupaten Aceh Tamiang	56,08	Inovatif
134.	Kabupaten Jeneponto	55,74	Inovatif
135.	Kabupaten Aceh Barat	55,64	Inovatif
136.	Kabupaten Maluku Tengah	55,60	Inovatif
137.	Kabupaten Ciamis	55,56	Inovatif
138.	Kabupaten Halmahera Timur	55,46	Inovatif
139.	Kabupaten Batang	55,32	Inovatif
140.	Kabupaten Agam	55,23	Inovatif
141.	Kabupaten Badung	55,15	Inovatif

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
142.	Kabupaten Sumbawa Barat	55,09	Inovatif
143.	Kabupaten Tana Tidung	55,00	Inovatif
144.	Kabupaten Halmahera Utara	54,91	Inovatif
145.	Kabupaten Demak	54,89	Inovatif
146.	Kabupaten Pesawaran	54,82	Inovatif
147.	Kabupaten Manggarai	54,78	Inovatif
148.	Kabupaten Asahan	54,71	Inovatif
149.	Kabupaten Bireuen	54,54	Inovatif
150.	Kabupaten Boalemo	54,52	Inovatif
151.	Kabupaten Seluma	54,41	Inovatif
152.	Kabupaten Bengkulu Utara	54,37	Inovatif
153.	Kabupaten Jepara	54,11	Inovatif
154.	Kabupaten Wonosobo	53,90	Inovatif
155.	Kabupaten Cianjur	53,03	Inovatif
156.	Kabupaten Kotawaringin Barat	52,95	Inovatif
157.	Kabupaten Indramayu	52,92	Inovatif
158.	Kabupaten Gayo Lues	52,76	Inovatif
159.	Kabupaten Gunungkidul	52,75	Inovatif
160.	Kabupaten Aceh Singkil	52,74	Inovatif
161.	Kabupaten Kubu Raya	52,73	Inovatif
162.	Kabupaten Rembang	52,44	Inovatif
163.	Kabupaten Takalar	52,32	Inovatif
164.	Kabupaten Karawang	52,11	Inovatif
165.	Kabupaten Purbalingga	52,01	Inovatif
166.	Kabupaten Sumbawa	51,98	Inovatif
167.	Kabupaten Tulang Bawang Barat	51,97	Inovatif
168.	Kabupaten Kaimana	51,80	Inovatif
169.	Kabupaten Tojo Una Una	51,78	Inovatif
170.	Kabupaten Pidie	51,54	Inovatif
171.	Kabupaten Barito Kuala	51,38	Inovatif
172.	Kabupaten Konawe Selatan	51,35	Inovatif
173.	Kabupaten Flores Timur	51,33	Inovatif
174.	Kabupaten Ponorogo	51,26	Inovatif
175.	Kabupaten Soppeng	51,09	Inovatif
176.	Kabupaten Ogan Komering Ulu	50,96	Inovatif
177.	Kabupaten Tasikmalaya	50,78	Inovatif
178.	Kabupaten Kerinci	50,71	Inovatif
179.	Kabupaten Karimun	50,70	Inovatif
180.	Kabupaten Bangka Barat	50,32	Inovatif
181.	Kabupaten Barito Utara	50,24	Inovatif
182.	Kabupaten Serang	50,10	Inovatif
183.	Kabupaten Ngada	49,97	Inovatif
184.	Kabupaten Solok Selatan	49,86	Inovatif
185.	Kabupaten Sanggau	49,78	Inovatif
186.	Kabupaten Nias	49,72	Inovatif
187.	Kabupaten Solok	49,61	Inovatif
188.	Kabupaten Purwakarta	49,60	Inovatif
189.	Kabupaten Luwu Utara	49,53	Inovatif
190.	Kabupaten Seram Bagian Barat	49,46	Inovatif
191.	Kabupaten Aceh Timur	49,42	Inovatif
192.	Kabupaten Serdang Bedagai	49,36	Inovatif
193.	Kabupaten Sikka	49,35	Inovatif

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
194.	Kabupaten Luwu	49,34	Inovatif
195.	Kabupaten Padang Lawas Utara	49,26	Inovatif
196.	Kabupaten Dairi	49,19	Inovatif
197.	Kabupaten Aceh Besar	49,00	Inovatif
198.	Kabupaten Indragiri Hilir	48,98	Inovatif
199.	Kabupaten Buol	48,96	Inovatif
200.	Kabupaten Kutai Timur	48,88	Inovatif
201.	Kabupaten Pakpak Bharat	48,71	Inovatif
202.	Kabupaten Bombana	48,69	Inovatif
203.	Kabupaten Kepulauan Meranti	48,64	Inovatif
204.	Kabupaten Nagan Raya	48,53	Inovatif
205.	Kabupaten Pesisir Barat	48,48	Inovatif
206.	Kabupaten Sijunjung	48,45	Inovatif
207.	Kabupaten Lima Puluh Kota	48,34	Inovatif
208.	Kabupaten Aceh Tengah	48,28	Inovatif
209.	Kabupaten Timor Tengah Utara	48,22	Inovatif
210.	Kabupaten Sukamara	48,20	Inovatif
211.	Kabupaten Gorontalo Utara	48,16	Inovatif
212.	Kabupaten Kotabaru	48,03	Inovatif
213.	Kabupaten Wajo	47,84	Inovatif
214.	Kabupaten Langkat	47,81	Inovatif
215.	Kabupaten Nias Utara	47,74	Inovatif
216.	Kabupaten Pandeglang	47,63	Inovatif
217.	Kabupaten Konawe Utara	47,60	Inovatif
218.	Kabupaten Tapanuli Selatan	47,46	Inovatif
219.	Kabupaten Lombok Barat	47,44	Inovatif
220.	Kabupaten Manggarai Barat	47,43	Inovatif
221.	Kabupaten Siak	47,37	Inovatif
222.	Kabupaten Indragiri Hulu	47,34	Inovatif
223.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	47,21	Inovatif
224.	Kabupaten Ketapang	47,21	Inovatif
225.	Kabupaten Lingga	47,10	Inovatif
226.	Kabupaten Bandung Barat	47,02	Inovatif
227.	Kabupaten Banjarnegara	46,96	Inovatif
228.	Kabupaten Mimika	46,95	Inovatif
229.	Kabupaten Bima	46,91	Inovatif
230.	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	46,75	Inovatif
231.	Kabupaten Lamandau	46,63	Inovatif
232.	Kabupaten Bengkalis	46,55	Inovatif
233.	Kabupaten Aceh Utara	46,52	Inovatif
234.	Kabupaten Tanah Bumbu	46,31	Inovatif
235.	Kabupaten Berau	46,21	Inovatif
236.	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	46,18	Inovatif
237.	Kabupaten Morowali Utara	46,13	Inovatif
238.	Kabupaten Pinrang	45,97	Inovatif
239.	Kabupaten Kepulauan Selayar	45,94	Inovatif
240.	Kabupaten Konawe	45,90	Inovatif
241.	Kabupaten Nabire	45,72	Inovatif
242.	Kabupaten Buru Selatan	45,67	Inovatif
243.	Kabupaten Mandailing Natal	45,64	Inovatif
244.	Kabupaten Paser	45,46	Inovatif
245.	Kabupaten Lampung Timur	45,44	Inovatif

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
246.	Kabupaten Tapanuli Utara	45,43	Inovatif
247.	Kabupaten Natuna	45,35	Inovatif
248.	Kabupaten Jemberana	45,25	Inovatif
249.	Kabupaten Kepulauan Sangihe	45,20	Inovatif
250.	Kabupaten Pangandaran	45,19	Inovatif
251.	Kabupaten Sinjai	45,15	Inovatif
252.	Kabupaten Bener Meriah	45,01	Inovatif
253.	Kabupaten Kuantan Singingi	45,01	Inovatif
254.	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	44,88	Inovatif
255.	Kabupaten Sabu Rajjua	44,75	Inovatif
256.	Kabupaten Penajam Paser Utara	44,73	Inovatif
257.	Kabupaten Maros	44,60	Inovatif
258.	Kabupaten Nias Selatan	44,22	Inovatif
259.	Kabupaten Labuhanbatu	44,14	Inovatif
260.	Kabupaten Banggai Kepulauan	44,10	Inovatif
261.	Kabupaten Musi Banyuasin	44,08	Inovatif
262.	Kabupaten Toraja Utara	44,00	Inovatif
263.	Kabupaten Kaur	43,95	Inovatif
264.	Kabupaten Merangin	43,84	Inovatif
265.	Kabupaten Polewali Mandar	43,67	Inovatif
266.	Kabupaten Musi Rawas	43,51	Inovatif
267.	Kabupaten Katingan	43,50	Inovatif
268.	Kabupaten Bone Bolango	43,48	Inovatif
269.	Kabupaten Kediri	43,34	Inovatif
270.	Kabupaten Rokan Hulu	43,25	Inovatif
271.	Kabupaten Tanah Datar	43,17	Inovatif
272.	Kabupaten Timor Tengah Selatan	43,11	Inovatif
273.	Kabupaten Way Kanan	43,00	Inovatif
274.	Kabupaten Bengkayang	42,75	Inovatif
275.	Kabupaten Tebo	42,63	Inovatif
276.	Kabupaten Kepulauan Anambas	42,55	Inovatif
277.	Kabupaten Pulau Morotai	42,54	Inovatif
278.	Kabupaten Donggala	42,50	Inovatif
279.	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	42,36	Inovatif
280.	Kabupaten Majene	42,21	Inovatif
281.	Kabupaten Bantaeng	42,16	Inovatif
282.	Kabupaten Sidenreng Rappang	42,10	Inovatif
283.	Kabupaten Lebong	42,08	Inovatif
284.	Kabupaten Buton	42,02	Inovatif
285.	Kabupaten Bone	41,85	Inovatif
286.	Kabupaten Murung Raya	41,75	Inovatif
287.	Kabupaten Landak	41,50	Inovatif
288.	Kabupaten Lampung Tengah	41,48	Inovatif
289.	Kabupaten Mamuju	41,42	Inovatif
290.	Kabupaten Musi Rawas Utara	41,40	Inovatif
291.	Kabupaten Sekadau	41,31	Inovatif
292.	Kabupaten Labuhanbatu Utara	41,27	Inovatif
293.	Kabupaten Barito Timur	41,22	Inovatif
294.	Kabupaten Bengkulu Tengah	41,10	Inovatif
295.	Kabupaten Simeulue	41,01	Inovatif
296.	Kabupaten Tapanuli Tengah	40,88	Inovatif
297.	Kabupaten Gowa	40,73	Inovatif

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
298.	Kabupaten Banggai Laut	40,69	Inovatif
299.	Kabupaten Jayapura	40,22	Inovatif
300.	Kabupaten Parigi Moutong	40,04	Inovatif
301.	Kabupaten Pidie Jaya	39,96	Kurang Inovatif
302.	Kabupaten Maluku Barat Daya	39,92	Kurang Inovatif
303.	Kabupaten Lembata	39,87	Kurang Inovatif
304.	Kabupaten Gorontalo	39,86	Kurang Inovatif
305.	Kabupaten Bolaang Mongondow	39,58	Kurang Inovatif
306.	Kabupaten Toli-Toli	39,51	Kurang Inovatif
307.	Kabupaten Sumba Barat	39,48	Kurang Inovatif
308.	Kabupaten Toba	39,12	Kurang Inovatif
309.	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	38,80	Kurang Inovatif
310.	Kabupaten Lahat	38,75	Kurang Inovatif
311.	Kabupaten Aceh Selatan	38,74	Kurang Inovatif
312.	Kabupaten Rokan Hilir	38,67	Kurang Inovatif
313.	Kabupaten Belitung	38,66	Kurang Inovatif
314.	Kabupaten Konawe Kepulauan	38,66	Kurang Inovatif
315.	Kabupaten Sarmi	38,66	Kurang Inovatif
316.	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	38,33	Kurang Inovatif
317.	Kabupaten Kolaka	38,32	Kurang Inovatif
318.	Kabupaten Sintang	37,67	Kurang Inovatif
319.	Kabupaten Melawi	37,27	Kurang Inovatif
320.	Kabupaten Rote Ndao	37,24	Kurang Inovatif
321.	Kabupaten Kolaka Utara	37,22	Kurang Inovatif
322.	Kabupaten Sumba Barat Daya	37,06	Kurang Inovatif
323.	Kabupaten Kayong Utara	36,91	Kurang Inovatif
324.	Kabupaten Samosir	36,70	Kurang Inovatif
325.	Kabupaten Belu	36,50	Kurang Inovatif
326.	Kabupaten Mempawah	36,38	Kurang Inovatif
327.	Kabupaten Poso	36,02	Kurang Inovatif
328.	Kabupaten Simalungun	35,54	Kurang Inovatif
329.	Kabupaten Rejang Lebong	35,46	Kurang Inovatif
330.	Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro	35,04	Kurang Inovatif
331.	Kabupaten Halmahera Barat	34,54	Kurang Inovatif
332.	Kabupaten Kuningan	33,39	Kurang Inovatif
333.	Kabupaten Muna	33,14	Kurang Inovatif
334.	Kabupaten Teluk Wondama	33,03	Kurang Inovatif
335.	Kabupaten Pohuwato	32,99	Kurang Inovatif
336.	Kabupaten Seruyan	32,87	Kurang Inovatif
337.	Kabupaten Kupang	32,34	Kurang Inovatif
338.	Kabupaten Buton Selatan	32,00	Kurang Inovatif
339.	Kabupaten Batanghari	29,10	Kurang Inovatif
340.	Kabupaten Sumba Tengah	28,30	Kurang Inovatif
341.	Kabupaten Kapuas	27,26	Kurang Inovatif
342.	Kabupaten Merauke	25,56	Kurang Inovatif
343.	Kabupaten Muaro Jambi	24,88	Kurang Inovatif
344.	Kabupaten Kepulauan Tanimbar	24,44	Kurang Inovatif
345.	Kabupaten Nias Barat	24,28	Kurang Inovatif
346.	Kabupaten Kutai Barat	21,64	Kurang Inovatif
347.	Kabupaten Wakatobi	21,46	Kurang Inovatif
348.	Kabupaten Aceh Barat Daya	21,16	Kurang Inovatif
349.	Kabupaten Kapuas Hulu	20,82	Kurang Inovatif

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
350.	Kabupaten Fak Fak	20,62	Kurang Inovatif
351.	Kabupaten Kolaka Timur	19,38	Kurang Inovatif
352.	Kabupaten Tana Toraja	18,36	Kurang Inovatif
353.	Kabupaten Kepahiang	18,24	Kurang Inovatif
354.	Kabupaten Ende	17,78	Kurang Inovatif
355.	Kabupaten Enrekang	17,20	Kurang Inovatif
356.	Kabupaten Buton Tengah	17,06	Kurang Inovatif
357.	Kabupaten Nagekeo	16,50	Kurang Inovatif
358.	Kabupaten Sarolangun	16,36	Kurang Inovatif
359.	Kabupaten Dogiyai	15,52	Kurang Inovatif
360.	Kabupaten Intan Jaya	14,68	Kurang Inovatif
361.	Kabupaten Sigi	14,50	Kurang Inovatif
362.	Kabupaten Nunukan	13,48	Kurang Inovatif
363.	Kabupaten Pulang Pisau	13,40	Kurang Inovatif
364.	Kabupaten Maluku Tenggara	13,12	Kurang Inovatif
365.	Kabupaten Kepulauan Aru	13,00	Kurang Inovatif
366.	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	12,50	Kurang Inovatif
367.	Kabupaten Malaka	12,30	Kurang Inovatif
368.	Kabupaten Pegunungan Arfak	12,20	Kurang Inovatif
369.	Kabupaten Manokwari	12,12	Kurang Inovatif
370.	Kabupaten Aceh Tenggara	12,04	Kurang Inovatif
371.	Kabupaten Muna Barat	12,00	Kurang Inovatif
372.	Kabupaten Buru	11,90	Kurang Inovatif
373.	Kabupaten Asmat	11,50	Kurang Inovatif
374.	Kabupaten Keerom	10,20	Kurang Inovatif
375.	Kabupaten Deiyai	9,80	Kurang Inovatif
376.	Kabupaten Minahasa	9,80	Kurang Inovatif
377.	Kabupaten Mamasa	9,40	Kurang Inovatif
378.	Kabupaten Minahasa Tenggara	9,20	Kurang Inovatif
379.	Kabupaten Pulau Taliabu	9,10	Kurang Inovatif
380.	Kabupaten Mahakam Ulu	8,40	Kurang Inovatif
381.	Kabupaten Pasangkayu	8,40	Kurang Inovatif
382.	Kabupaten Manggarai Timur	8,00	Kurang Inovatif
383.	Kabupaten Teluk Bintuni	8,00	Kurang Inovatif
384.	Kabupaten Bungo	7,50	Kurang Inovatif
385.	Kabupaten Padang Lawas	7,30	Kurang Inovatif
386.	Kabupaten Seram Bagian Timur	7,20	Kurang Inovatif
387.	Kabupaten Kepulauan Yapen	7,10	Kurang Inovatif
388.	Kabupaten Mukomuko	6,20	Kurang Inovatif
389.	Kabupaten Alor	5,80	Kurang Inovatif
390.	Kabupaten Kepulauan Talaud	5,60	Kurang Inovatif
391.	Kabupaten Kepulauan Sula	4,60	Kurang Inovatif
392.	Kabupaten Buton Utara	4,20	Kurang Inovatif
393.	Kabupaten Mappi	3,90	Kurang Inovatif
394.	Kabupaten Yalimo	3,70	Kurang Inovatif
395.	Kabupaten Nduga	3,10	Kurang Inovatif
396.	Kabupaten Boven Digoel	2,10	Kurang Inovatif
397.	Kabupaten Minahasa Selatan	1,80	Kurang Inovatif
398.	Kabupaten Manokwari Selatan	1,20	Kurang Inovatif
399.	Kabupaten Paniai	1,20	Kurang Inovatif
400.	Kabupaten Puncak	1,20	Kurang Inovatif
401.	Kabupaten Biak Numfor	0,00	Tidak Dapat Dinilai

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
402.	Kabupaten Jayawijaya	0,00	Tidak Dapat Dinilai
403.	Kabupaten Lanny Jaya	0,00	Tidak Dapat Dinilai
404.	Kabupaten Mamberamo Raya	0,00	Tidak Dapat Dinilai
405.	Kabupaten Mamberamo Tengah	0,00	Tidak Dapat Dinilai
406.	Kabupaten Maybrat	0,00	Tidak Dapat Dinilai
407.	Kabupaten Pegunungan Bintang	0,00	Tidak Dapat Dinilai
408.	Kabupaten Puncak Jaya	0,00	Tidak Dapat Dinilai
409.	Kabupaten Raja Ampat	0,00	Tidak Dapat Dinilai
410.	Kabupaten Sorong Selatan	0,00	Tidak Dapat Dinilai
411.	Kabupaten Supiori	0,00	Tidak Dapat Dinilai
412.	Kabupaten Tamberauw	0,00	Tidak Dapat Dinilai
413.	Kabupaten Tolikara	0,00	Tidak Dapat Dinilai
414.	Kabupaten Waropen	0,00	Tidak Dapat Dinilai
415.	Kabupaten Yahukimo	0,00	Tidak Dapat Dinilai

### C. Kategori Kota

Rekapitulasi:

- 1) Sangat Inovatif : 31 Kota
- 2) Inovatif : 55 Kota
- 3) Kurang Inovatif : 7 Kota
- 4) Tidak Dapat Dinilai (*Disclaimer*) : 0 Kota

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
1.	Kota Mojokerto	95,43	Sangat Inovatif
2.	Kota Surabaya	94,98	Sangat Inovatif
3.	Kota Bekasi	94,43	Sangat Inovatif
4.	Kota Tidore Kepulauan	92,61	Sangat Inovatif
5.	Kota Surakarta	90,59	Sangat Inovatif
6.	Kota Palembang	88,02	Sangat Inovatif
7.	Kota Padang Panjang	87,94	Sangat Inovatif
8.	Kota Pekalongan	85,91	Sangat Inovatif
9.	Kota Bima	85,64	Sangat Inovatif
10.	Kota Bandar Lampung	84,28	Sangat Inovatif
11.	Kota Sukabumi	83,52	Sangat Inovatif
12.	Kota Cimahi	83,42	Sangat Inovatif
13.	Kota Mataram	83,09	Sangat Inovatif
14.	Kota Bengkulu	82,31	Sangat Inovatif
15.	Kota Denpasar	81,70	Sangat Inovatif
16.	Kota Magelang	81,14	Sangat Inovatif
17.	Kota Probolinggo	79,02	Sangat Inovatif
18.	Kota Madiun	75,18	Sangat Inovatif
19.	Kota Palopo	74,55	Sangat Inovatif
20.	Kota Batu	73,39	Sangat Inovatif
21.	Kota Tangerang	72,94	Sangat Inovatif
22.	Kota Jambi	71,75	Sangat Inovatif
23.	Kota Yogyakarta	69,64	Sangat Inovatif
24.	Kota Semarang	69,02	Sangat Inovatif
25.	Kota Tegal	68,73	Sangat Inovatif
26.	Kota Padang	67,64	Sangat Inovatif

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
27.	Kota Parepare	66,84	Sangat Inovatif
28.	Kota Serang	66,82	Sangat Inovatif
29.	Kota Sawahlunto	66,08	Sangat Inovatif
30.	Kota Kediri	66,01	Sangat Inovatif
31.	Kota Bandung	65,07	Sangat Inovatif
32.	Kota Pariaman	63,50	Inovatif
33.	Kota Solok	63,17	Inovatif
34.	Kota Banjarmasin	62,95	Inovatif
35.	Kota Batam	61,91	Inovatif
36.	Kota Makassar	61,75	Inovatif
37.	Kota Blitar	61,34	Inovatif
38.	Kota Bontang	60,94	Inovatif
39.	Kota Balikpapan	60,92	Inovatif
40.	Kota Tangerang Selatan	60,76	Inovatif
41.	Kota Metro	60,71	Inovatif
42.	Kota Bogor	60,41	Inovatif
43.	Kota Pekanbaru	59,13	Inovatif
44.	Kota Dumai	59,03	Inovatif
45.	Kota Kotamobagu	58,62	Inovatif
46.	Kota Pontianak	58,47	Inovatif
47.	Kota Palu	58,32	Inovatif
48.	Kota Samarinda	58,27	Inovatif
49.	Kota Medan	58,16	Inovatif
50.	Kota Banjar	57,80	Inovatif
51.	Kota Malang	57,62	Inovatif
52.	Kota Sungai Penuh	57,42	Inovatif
53.	Kota Kendari	56,28	Inovatif
54.	Kota Banjarbaru	56,19	Inovatif
55.	Kota Singkawang	55,60	Inovatif
56.	Kota Pangkal Pinang	55,52	Inovatif
57.	Kota Bitung	54,73	Inovatif
58.	Kota Lubuk Linggau	54,66	Inovatif
59.	Kota Binjai	54,54	Inovatif
60.	Kota Pasuruan	54,53	Inovatif
61.	Kota Bukittinggi	53,58	Inovatif
62.	Kota Tasikmalaya	52,57	Inovatif
63.	Kota Palangkaraya	52,01	Inovatif
64.	Kota Payakumbuh	51,50	Inovatif
65.	Kota Depok	49,71	Inovatif
66.	Kota Gorontalo	49,42	Inovatif
67.	Kota Salatiga	48,88	Inovatif
68.	Kota Cilegon	48,30	Inovatif
69.	Kota Gunungsitoli	48,29	Inovatif
70.	Kota Cirebon	48,18	Inovatif
71.	Kota Langsa	47,79	Inovatif
72.	Kota Manado	47,52	Inovatif
73.	Kota Ambon	47,39	Inovatif
74.	Kota Bau Bau	46,80	Inovatif
75.	Kota Pematangsiantar	46,00	Inovatif
76.	Kota Padangsidempuan	44,29	Inovatif
77.	Kota Ternate	44,26	Inovatif
78.	Kota Subulussalam	44,06	Inovatif

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
79.	Kota Pagar Alam	43,49	Inovatif
80.	Kota Banda Aceh	43,40	Inovatif
81.	Kota Tanjungbalai	42,70	Inovatif
82.	Kota Tanjung Pinang	42,38	Inovatif
83.	Kota Tarakan	40,98	Inovatif
84.	Kota Prabumulih	40,94	Inovatif
85.	Kota Tomohon	40,83	Inovatif
86.	Kota Sibolga	40,78	Inovatif
87.	Kota Lhokseumawe	29,68	Kurang Inovatif
88.	Kota Tebing Tinggi	23,52	Kurang Inovatif
89.	Kota Kupang	22,96	Kurang Inovatif
90.	Kota Sabang	19,88	Kurang Inovatif
91.	Kota Tual	15,68	Kurang Inovatif
92.	Kota Sorong	9,70	Kurang Inovatif
93.	Kota Jayapura	8,10	Kurang Inovatif

Rekapitulasi Total

Pemerintah Daerah Sangat Inovatif : 108 Pemerintah Daerah  
Pemerintah Daerah Inovatif : 309 Pemerintah Daerah  
Pemerintah Daerah Kurang Inovatif : 114 Pemerintah Daerah  
Pemerintah Daerah Tidak Dapat Dinilai : 15 Pemerintah Daerah

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum



Dr. Asmawa, AP., M.Si  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 197410151993111003